

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0	Harian Umum	Online	Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo
---	---	---	---	-------------	--------	-----------------------------------

Tiga Daerah Raih WTP

GORONTALO (RAGORO) - Tiga daerah yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) (WTP) dari BPR. Ini

► [Baca RAIH...Hal 2](#)



KEPALA Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Rahmadi SE, bersama Walikota Marten Taha, Bupati Kabgor Nelson Pomalingo dan Bupati Bone Bolango Hamim Pou. (foto:riel)

RAIH...

■ Sambungan dari Hal 1

sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), berdasarkan laporan keuangan Pemda tahun 2019.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Rahmadi SE, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda tahun anggaran 2019 di wilayah Provinsi Gorontalo, di aula BPK-RI perwakilan Provinsi Gorontalo, Kamis (4/6) kemarin.

Hadir saat itu, Walikota Marten Taha, Wakil Wali Kota Kono, Ketua DPRD Mo-

hammad Rivai Bukus. Dari Kabupaten Gorontalo dihadiri langsung Bupati Nelson Pomalingo, Ketua DPR Syam T. Ase, Sekkab Hadijah Tayeb, Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan, Roswati Lasimpala.

Sedangkan dari Bone Bolango dihadiri langsung Bupati Hamim Pou, ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu, didampingi kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Bonebol, Yusni Bolilio. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung Kepala BPKP perwakilan Provinsi Gorontalo, Raden Murwan-tara.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Rahmadi mengatakan sesuai dengan UU No 15-2004,

dan UU no 15 tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 untuk pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango.

Dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), kecukupan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system intern.

"tahun 2019 merupakan tahun ke-5 bagi pemerintah pusat dan daerah se-Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik system akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, dengan penerapan berbasis akrual. Pemerintah daerah dapat lebih komprehensif menya-

jikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan serta penggunaan kekayaan, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih," ujarnya.

Rahmadi sendiri mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh setiap Pemda atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2019, yang sebagian besar sesuai dengan rencana dan aksi atau action plan yang dibuat kepala daerah, sehingga LKPD 2019 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

"alhamdulillah, penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 ini dapat diserahkan kepada ketua DPRD dan kepala daerah." tutur Rahmadi. (riel/RG)